



Analisis Penerapan *E-Accounting* Untuk Meningkatkan Tata Kelola Dan Mencegah Kecurangan Pada Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Pada BPKAD Kota Surabaya

Reinatto Yakobus Pati Agon Atakelan^{1*}, Muhammad Taufiq Hidayat²

¹⁻² Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis: reinatakelan25@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of e-Accounting in improving governance and preventing conditions in the preparation of Regional Government Financial Reports (LKPD) at the BPKAD of Surabaya City. The study used a qualitative descriptive approach through in-depth interviews, observation, and documentation, with informants from the Head of the Accounting Team and the BPKAD accounting supervisor. The results of the study indicate that the implementation of e-Accounting is effective and has a significant impact in four main aspects. First, the system is able to increase the effectiveness of the LKPD preparation process through automatic data retrieval, system validation, and cross-unit integration, thereby minimizing manual errors. Second, e-Accounting strengthens governance through transparency, accountability, and access rights retrieval. Third, the system has been proven to provide opportunities for fraud. Fourth, e-Accounting improves the quality of financial reports because the data produced is faster, more accurate, and in accordance with accrual-based SAP standards.*

Keywords: *E-Accounting; Governance; Fraud, LKPD*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *e-Accounting* dalam meningkatkan tata kelola serta mencegah kecurangan pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di BPKAD Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan informan dari Ketua Tim Akuntansi serta penyelia akuntansi BPKAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-Accounting* berjalan efektif dan memberikan dampak signifikan dalam empat aspek utama. Pertama, sistem mampu meningkatkan efektivitas proses penyusunan LKPD melalui penarikan data otomatis, validasi sistem, dan integrasi lintas unit sehingga meminimalkan kesalahan manual. Kedua, *e-Accounting* memperkuat tata kelola melalui transparansi, akuntabilitas, pembatasan hak akses. Ketiga, sistem terbukti mempersempit peluang terjadinya kecurangan (*fraud*). Keempat, *e-Accounting* meningkatkan kualitas laporan keuangan karena data yang dihasilkan lebih cepat, tepat, dan sesuai standar SAP berbasis akrual..

Kata kunci: *E-Accounting; Tata Kelola; Mencegah Kecurangan; LKPD*.

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek strategis dalam pemerintahan karena berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengelola anggaran secara transparan, efektif, dan akuntabel sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 1 Tahun 2004. Dalam konteks tersebut, penyusunan LKPD berperan sebagai instrumen utama akuntabilitas publik. LKPD tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap penggunaan dana publik setiap tahun anggaran.

Tuntutan transparansi semakin tinggi seiring perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan publik. Sistem pencatatan manual dinilai tidak lagi memadai karena rentan terhadap kesalahan, keterlambatan proses, dan potensi manipulasi. Temuan BPK juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian pencatatan, kelemahan pengendalian internal, serta penyimpangan yang mengarah pada kecurangan. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan sistem informasi keuangan melalui pemanfaatan teknologi digital sebagaimana diarahkan dalam PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020.

Peningkatan kualitas pelaporan keuangan semakin ditekankan sejak diberlakukannya SAP berbasis akrual melalui PP No. 71 Tahun 2010. Standar tersebut menuntut pencatatan transaksi secara lebih sistematis dan lengkap, sehingga implementasinya membutuhkan dukungan sistem terintegrasi. Oleh sebab itu, pemerintah daerah didorong menerapkan sistem informasi akuntansi berbasis elektronik seperti *e-Accounting*, yang sejalan dengan kebijakan SPBE melalui Perpres No. 95 Tahun 2018.

E-Accounting berfungsi mempercepat proses penyusunan laporan, meningkatkan akurasi data, meminimalkan kesalahan input, serta memperkuat pengendalian internal melalui pembatasan akses dan jejak audit digital. Sistem ini juga memainkan peran penting dalam pencegahan kecurangan dengan menutup peluang manipulasi yang sering muncul pada proses manual. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penguatan pengendalian internal, kompetensi SDM, dan pemanfaatan teknologi merupakan faktor penting dalam pencegahan fraud dan peningkatan tata kelola.

Pemerintah Kota Surabaya telah mengimplementasikan *e-Accounting* secara luas melalui BPKAD, di mana seluruh perangkat daerah diwajibkan menggunakan aplikasi ini dalam penyusunan laporan keuangan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti gangguan jaringan, keterbatasan server, dan variasi kompetensi SDM. Meskipun sistem ini tergolong matang digunakan, efektivitas *e-Accounting* dalam meningkatkan tata kelola dan mencegah kecurangan masih perlu dikaji secara empiris karena penelitian sejenis masih terbatas dan cenderung fokus pada satu aspek saja. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai peran *e-Accounting* dalam mendukung akuntabilitas, transparansi, dan pencegahan fraud pada penyusunan LKPD di BPKAD Kota Surabaya.

2. KAJIAN TEORITIS

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik merupakan cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan organisasi pemerintah serta berbagai institusi nirlaba yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan mencari laba. (Sitepu et al., 2024)

Menurut *American Accounting Association* dalam (Majid, 2019), akuntansi sektor publik memiliki dua tujuan utama, yaitu akuntabilitas dan pengendalian manajemen. Akuntabilitas menekankan pentingnya penyajian informasi yang digunakan manajer untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran, sekaligus memberikan laporan kepada masyarakat mengenai kegiatan operasional pemerintah. Sementara itu, pengendalian manajemen berkaitan dengan penyediaan informasi yang diperlukan untuk mengelola organisasi secara efektif, efisien, dan ekonomis sesuai sumber daya yang telah dialokasikan.

Organisasi sektor publik memiliki karakteristik khas karena berorientasi pada pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak seperti sektor swasta yang mencari laba, pendanaan organisasi sektor publik berasal dari masyarakat sehingga tidak ada tuntutan pengembalian modal atau bunga. Di sisi lain, akuntansi sektor publik beroperasi dalam lingkungan yang lebih kompleks karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, budaya, dan kondisi demografis, sehingga menuntut sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. (Majid, 2019)

Tata Kelola

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prinsip penting dalam administrasi publik yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan penegakan hukum. Dalam sektor publik, *good governance* berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab, efisien, adil, dan berintegritas (Sitepu et al., 2024). Penerapan prinsip ini di Indonesia diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mewajibkan seluruh aktivitas pemerintahan berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, dan larangan penyalahgunaan wewenang. (UU, 2014) Aturan tersebut menjadi landasan bagi pejabat publik untuk bertindak profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam perkembangannya, penerapan

good governance semakin dikuatkan melalui reformasi birokrasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Menurut (Mardiasmo, 2024), tata kelola yang baik tidak hanya bergantung pada sistem administrasi yang terbuka, tetapi juga pada digitalisasi yang meningkatkan akuntabilitas serta memudahkan pengawasan publik.

Secara umum, penerapan *good governance* bertumpu pada beberapa prinsip utama. Pertama, transparansi, yaitu keterbukaan informasi agar masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi proses pemerintahan. Informasi yang diberikan harus akurat dan mudah dipahami (Khairudin et al., 2021). Kedua, akuntabilitas, yang menuntut setiap unit pemerintahan untuk bertanggung jawab atas keputusan dan penggunaan sumber daya publik melalui kejelasan fungsi dan struktur organisasi. Ketiga, efektivitas, yaitu kemampuan organisasi mencapai tujuan dan sasaran dengan penggunaan sumber daya yang tepat dan optimal sesuai prinsip *value for money*

Mencegah Kecurangan (*Fraud*)

Fraud adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan merugikan pihak lain. (ACFE, 2022) menyebut *fraud* sebagai tindakan penipuan, menyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Dalam sektor pemerintahan, *fraud* sering terjadi pada pengadaan barang dan jasa, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan anggaran. (ACFE, 2022) mengelompokkan *fraud* menjadi tiga jenis utama.

Pertama, *Asset Misappropriation*, yaitu penyalahgunaan aset seperti pencurian kas, pemalsuan bukti pengeluaran, atau penggelapan inventaris. Jenis ini paling sering terjadi karena mudah dilakukan.

Kedua, *Corruption*, yaitu penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Bentuknya meliputi korupsi yang merugikan keuangan negara, suap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi (Salsabila et al., 2025). Upaya pemberantasannya diperkuat melalui UU No. 19 Tahun 2019 (UU, 2019) yang memberikan kewenangan luas kepada KPK dalam pencegahan hingga penindakan.

Ketiga, *Financial Statement Fraud*, yaitu manipulasi laporan keuangan, seperti mengakui pendapatan fiktif atau menyembunyikan kewajiban. Teori Pentagon dan Hexagon menjelaskan bahwa tekanan, peluang, rasionalisasi, kompetensi, arogansi, serta

egoisme manajerial dan tekanan keuangan dapat memicu terjadinya kecurangan laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan selama satu periode anggaran dan wajib disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). LKPD berfungsi memberikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, serta kinerja operasional yang diperlukan untuk menilai akuntabilitas dan mendukung pengambilan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Sebagai instrumen akuntabilitas publik, LKPD menjadi dasar bagi masyarakat, DPRD, dan BPK dalam menilai transparansi serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola APBD. Penyusunan LKPD berlandaskan berbagai regulasi penting, terutama PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan pembaruan SAP 2025 yang mewajibkan seluruh entitas pemerintah menerapkan basis akrual. Selain itu, pedoman pelaksanaannya dijelaskan dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, serta didukung oleh regulasi keuangan negara seperti UU 17/2003, UU 1/2004, dan UU 15/2004. Keseluruhan aturan tersebut memastikan bahwa LKPD disusun secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan utama LKPD adalah menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal untuk mengevaluasi akuntabilitas pemerintah daerah serta sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. SAP 2025 menetapkan bahwa LKPD terdiri dari tujuh komponen, yaitu: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Seluruh komponen ini saling melengkapi sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan, kinerja, dan penggunaan sumber daya pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.

E-Accounting

E-Accounting adalah sistem informasi berbasis teknologi yang digunakan untuk mengotomatisasi proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan. Pada pemerintah daerah, sistem ini berperan penting dalam meningkatkan efektivitas penyusunan laporan keuangan, mengurangi kesalahan manual, serta memperkuat

akuntabilitas. Penelitian (Rohma et al., 2023) menunjukkan bahwa *E-Accounting* di BPKAD Surabaya telah berjalan sesuai prosedur dan mampu menghasilkan informasi yang cepat dan akurat. (Aulia & Handayani, 2024) juga menegaskan bahwa sistem ini membantu mengatasi keterbatasan SDM dalam akuntansi berbasis akrual sehingga proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih mudah dan terstandar.

Digitalisasi keuangan juga terbukti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. (Alya et al., 2024) dan (Budiman et al., 2024) menyatakan bahwa sistem digital dapat meningkatkan keterbukaan informasi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini diperkuat oleh (Kusumawati, 2024) yang menilai bahwa digitalisasi mampu mengurangi kesalahan manual serta meningkatkan aksesibilitas dan akurasi data. Dalam konteks pencegahan *fraud*, sistem seperti *E-Accounting* berperan melalui integrasi data dan kontrol akses yang ketat. (Hasanah et al., 2025; Puspitasari & Manurung, 2025) menjelaskan bahwa transaksi dalam sistem digital lebih mudah ditelusuri sehingga mengurangi peluang manipulasi. Selain itu, (Salehoddin, 2025) menemukan bahwa kualitas laporan keuangan semakin meningkat ketika *E-Accounting* didukung SDM kompeten dan pengawasan internal yang kuat, sehingga potensi *fraud* dapat ditekan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui interaksi langsung di lapangan, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan dua pihak, yaitu Kepala Sub Bidang Akuntansi didasarkan pada perannya yang mengawasi dan terlibat secara langsung dalam seluruh proses pelaporan keuangan dan staf/ penyelia Bidang Akuntansi juga dipilih sebagai informan karena mereka menangani pekerjaan teknis utama dalam penyusunan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 1. Informan Penelitian

Informan	Jabatan
Agung Pambudi, S.E, M.Ak	Kepala Sub Bidang Akuntansi
Iman Rakhmadi, S.Kom	Penyelia Akuntansi
Desti Ningsih, A.Md	Penyelia Akuntansi

Data sekunder dalam penelitian ini mencakup profil organisasi, visi, dan misi BPKAD Surabaya yang diperoleh melalui situs resmi instansi tersebut. Selain itu, data pendukung juga diambil dari berbagai literatur, termasuk artikel, buku, jurnal, serta sumber informasi daring lainnya yang membahas implementasi dan efektivitas teknologi informasi berbasis akuntansi, maupun materi lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *E-Accounting* dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penerapan *E-Accounting* di BPKAD Kota Surabaya merupakan bagian dari transformasi digital pengelolaan keuangan daerah yang mulai dilaksanakan sejak 2015. Sistem ini dikembangkan secara mandiri oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai bentuk penyesuaian terhadap kewajiban penerapan SAP berbasis akrual sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010. Melalui penggunaan dashboard *E-Accounting*, proses penyusunan LKPD menjadi lebih cepat, terintegrasi, dan mudah diawasi. Informan menjelaskan bahwa proses rekonsiliasi yang sebelumnya memerlukan waktu lama kini jauh lebih efisien dibandingkan cara manual. Temuan lapangan ini sejalan dengan penelitian (Rohma et al., 2023) yang menunjukkan bahwa *E-Accounting* mampu mempercepat penyusunan LKPD hingga 70%. Selain itu, penerapan *E-Accounting* juga mendukung prinsip akuntabilitas, transparansi, integrasi data, serta ketepatan waktu sebagaimana diatur dalam PP 12/2019 dan Permendagri 77/2020.

Sebelum sistem ini diterapkan, penyusunan LKPD dilakukan secara sentralistik. OPD hanya menyerahkan bukti transaksi mentah, dan seluruh proses input dilakukan oleh BPKAD, sehingga rentan terjadi human error, keterlambatan, serta ketidaksesuaian format data. Setelah *E-Accounting* berlaku, pola kerja berubah menjadi desentralisasi terkontrol. Setiap OPD wajib menginput transaksi langsung ke sistem, sementara BPKAD bertugas memeriksa dan menggabungkan laporan.

Perubahan ini juga ditegaskan oleh Ketua Bidang Akuntansi BPKAD, yang menyampaikan bahwa:

“Seluruh laporan keuangan, sebelum menggunakan E-Accounting disusun secara tersentralisasi di BPKAD, sementara OPD hanya menyerahkan data pendukung. Saat ini setiap OPD diwajibkan menyusun laporan keuangannya sendiri, sehingga E-Accounting

Analisis Penerapan E-Accounting Untuk Meningkatkan Tata Kelola Dan Mencegah Kecurangan Pada Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Pada Bpkad Kota Surabaya dikembangkan untuk mempermudah proses penyusunan laporan tersebut pada masing-masing OPD.

Transformasi ini membuktikan bahwa digitalisasi melalui E-Accounting tidak hanya mengatasi kelemahan metode manual, tetapi juga meningkatkan kecepatan, akurasi, dan kualitas seluruh proses penyusunan LKPD di Pemerintah Kota Surabaya.

Penerapan *E-Accounting* dalam Meningkatkan Tata Kelola

Penerapan *E-Accounting* di BPKAD Kota Surabaya tidak hanya menjadi alat teknis untuk pencatatan keuangan, tetapi juga berperan sebagai instrumen strategis yang memperkuat prinsip-prinsip good governance. Prinsip-prinsip tersebut : transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kepastian hukum, dan responsivitas—telah ditetapkan dalam UU No. 30 Tahun 2014 dan menjadi dasar dalam pengelolaan pemerintahan yang baik. Sistem *E-Accounting* terbukti meningkatkan transparansi karena seluruh data transaksi yang dimasukkan oleh OPD, kecamatan, dan BLUD dapat dipantau secara langsung oleh BPKAD melalui akses khusus.

Hal ini ditegaskan oleh informan yang menyatakan bahwa:

“E-Accounting membuat proses penyusunan laporan keuangan lebih transparan dan dapat dipantau. Semua data yang dientry oleh OPD dapat dipantau langsung oleh penyelia akuntansi BPKAD.”

Keterbukaan ini juga sejalan dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Akuntabilitas juga meningkat karena setiap OPD kini wajib menyusun laporan keuangannya sendiri dan tidak lagi menyerahkan data mentah seperti sebelumnya.

Informan menegaskan hal ini dengan mengatakan:

“E-Accounting juga meningkatkan akuntabilitas karena OPD tidak lagi dapat hanya menyerahkan data mentah saja tetapi mengharuskan setiap OPD harus menyusun sendiri laporan keuangannya dan mempertanggungjawabkannya secara langsung.”

Dengan mekanisme ini, tanggung jawab kepala OPD menjadi lebih jelas baik secara vertikal maupun horizontal. Dari sisi efektivitas dan efisiensi, E-Accounting berhasil menghilangkan perbedaan format dan prosedur antar-OPD. Semua penyusunan laporan dilakukan melalui satu sistem terstandar, sehingga proses menjadi lebih cepat dan seragam.

Informan juga menjelaskan:

“Sistem ini juga menstandarkan prosedur penyusunan laporan sehingga lebih efisien dan seragam di seluruh OPD. Tidak ada lagi perbedaan format maupun metode, semuanya satu pintu melalui aplikasi E-Accounting.”

Penelitian sebelumnya bahkan menunjukkan bahwa digitalisasi sistem akuntansi dapat meningkatkan efisiensi hingga 35–40%. Secara keseluruhan, *penerapan E-Accounting* di Kota Surabaya berhasil memperkuat transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini mendukung berbagai penelitian yang menyatakan bahwa digitalisasi akuntansi merupakan pilar penting dalam reformasi birokrasi dan *good governance* di Indonesia.

Penerapan *E-Accounting* dalam Mencegah Kecurangan pada Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penerapan *E-Accounting* di BPKAD Kota Surabaya terbukti menjadi salah satu mekanisme paling efektif dalam mencegah kecurangan (*fraud*) pada penyusunan laporan keuangan daerah. Sebelum sistem ini diterapkan, penyusunan LKPD dilakukan secara manual dan sentralistik, sehingga ribuan transaksi harus diinput ulang oleh BPKAD. Kondisi ini membuka peluang besar terjadinya manipulasi data, baik dengan mengubah angka, menggeser klasifikasi, maupun menghilangkan jejak transaksi.

Hal tersebut dijelaskan oleh Ketua Bidang Akuntansi yang menyatakan:

“Ketika proses penyusunan laporan masih dilakukan secara manual, potensi terjadinya kesalahan maupun manipulasi jauh lebih besar. Hal tersebut terutama disebabkan oleh banyaknya data yang harus diinput, sehingga sangat bergantung pada ketelitian dan rawan terjadi kekeliruan tanpa disadari.”

E-Accounting kemudian mengubah seluruh proses tersebut dengan menutup celah fraud yang selama ini terjadi. Sistem ini bekerja langsung pada inti *Fraud Triangle*, khususnya pada aspek peluang (*opportunity*). Peluang manipulasi data menjadi sangat kecil karena transaksi tidak lagi diinput secara manual. Semua data pengeluaran dan penerimaan kini ditarik otomatis dari SP2D dan sistem pendapatan daerah.

Informan menegaskan hal ini dengan mengatakan:

“Sistem sudah menarik data secara otomatis dari transaksi SP2D baik untuk pengeluaran maupun penerimaan, sehingga ruang untuk melakukan manipulasi menjadi semakin kecil. Proses otomatis ini membuat data tidak lagi perlu diinput ulang, sehingga setiap transaksi tercatat sesuai kondisi sebenarnya.”

Selain itu, pembagian hak akses juga menjadi kunci pencegahan *fraud*. OPD hanya dapat melakukan input transaksi, sementara proses verifikasi sepenuhnya dilakukan oleh penyelia BPKAD tanpa kewenangan untuk mengubah transaksi seenaknya. Pembagian tugas ini memastikan tidak ada satu pihak yang mengendalikan seluruh proses.

Seperti yang dijelaskan oleh informan:

“OPD hanya memiliki akses untuk melakukan input data, sedangkan penyelia di BPKAD bertugas melakukan verifikasi tanpa memiliki kewenangan untuk mengubah transaksi secara bebas. Pembagian akses ini membuat proses lebih tertib dan mengurangi potensi penyalahgunaan.”

Secara keseluruhan, *E-Accounting* tidak hanya mempercepat penyusunan laporan, tetapi juga memperkuat sistem pengendalian internal dan secara signifikan mengurangi risiko *fraud* melalui otomatisasi data, pembatasan hak akses, dan mekanisme audit trail yang lebih kuat.

Dampak Penerapan *E-Accounting* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penerapan *E-Accounting* sejak tahun 2015 telah memberikan dampak besar terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Surabaya. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71/2010), kualitas laporan keuangan ditentukan oleh empat karakteristik utama: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. *E-Accounting* terbukti meningkatkan seluruh aspek tersebut secara signifikan.

Pertama, relevansi laporan meningkat karena data yang disajikan berasal dari transaksi aktual yang tercatat secara langsung. Tidak ada jeda waktu antara transaksi dan pelaporan. Hal ini ditegaskan oleh informan yang menyatakan:

“Setelah menggunakan aplikasi, proses jauh lebih cepat, akurat, dan otomatis. Data dari SP2D dan transaksi lain langsung mengalir ke jurnal dan laporan.”

Kedua, keandalan (*reliability*) laporan keuangan juga meningkat. Sebagian besar potensi human error pada era manual seperti salah ketik, salah kode akun, dan kesalahan penjumlahan berkurang drastis karena sistem telah terintegrasi otomatis. Informan menambahkan:

“Proses penyusunan laporan menjadi jauh lebih cepat, akurat, dan berjalan otomatis. Kesalahan input juga berkurang signifikan karena sebagian besar data sudah terintegrasi langsung melalui sistem ini.”

Ketiga, daya banding (*comparability*) semakin kuat. Seluruh OPD, kecamatan, dan BLUD kini menggunakan aplikasi yang sama, dengan format, struktur akun, dan metode akrual yang seragam. Hal ini membuat laporan antar-perangkat daerah lebih konsisten dan mudah dibandingkan. Keempat, kemudahan dipahami (*understandability*) meningkat karena laporan yang dihasilkan *E-Accounting* sudah mengikuti format SAP, termasuk penyajian CaLK yang lebih rapi dan terstruktur. Hal ini membuat laporan mudah ditelaah oleh auditor BPK, DPRD, maupun pihak lain.

Dampak paling nyata terlihat pada kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian laporan. Rekonsiliasi akhir tahun yang sebelumnya sering mepet dengan batas waktu, kini dapat diselesaikan jauh lebih cepat.

Informan menjelaskan:

“Menurut peraturan kita harus menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.....Selama ini deadlinenya tidak pernah terlewat dan semuanya tepat waktu selama menggunakan E-Accounting.”

Secara keseluruhan, *E-Accounting* menjadikan LKPD Kota Surabaya lebih relevan, andal, dapat dibandingkan, mudah dipahami, dan yang terpenting semakin dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan. Transformasi ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga menghadirkan standar kualitas baru yang layak dijadikan contoh bagi pemerintah daerah lainnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *E-Accounting* yang diterapkan BPKAD Kota Surabaya secara nyata meningkatkan kualitas tata kelola dan laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem ini membuat proses pencatatan dan penyusunan laporan lebih cepat, akurat, dan sesuai dengan SAP berbasis akrual. Integrasi otomatis dengan SP2D serta penggunaan format laporan yang seragam membuat data lebih konsisten dan mudah diperiksa.

Selain itu, *E-Accounting* meningkatkan transparansi serta akuntabilitas karena seluruh proses dapat dipantau dengan lebih jelas, tugas tiap pihak lebih terstruktur, dan verifikasi data menjadi lebih tertib. Sistem juga terbukti membantu mencegah kecurangan karena hak akses yang terbatas, pemrosesan transaksi otomatis, serta jejak audit yang mudah dilacak. Dengan demikian, *E-Accounting* bukan hanya memperbaiki kualitas

laporan, tetapi juga memperkuat pengendalian internal dan mendukung prinsip *good governance* di Pemerintah Kota Surabaya.

DAFTAR REFERENSI

- ACFE. (2022). *Report to the nations: Global study on occupational fraud and abuse*. ACFE.
- Alya, B. Z., Hanum, F., Nasirwan, Hasan, S., & Wahyuni, D. U. (2024). Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kota Medan). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*.
- Aulia, F. Z., & Handayani, N. (2024). Peran badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Budiman, N. F. S., Manossoh, H., & Wokas, H. R. N. (2024). Analisis Pemanfaatan Aplikasi FMIS Dalam Memenuhi Akuntabilitas Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Derah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 12(03). <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v12i03.57545>
- Hasanah, W., Adelia, Musyriyah, W. A., & Rohmi, putri kamilatul. (2025). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember. *Penelitian Nusantara*. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.86>
- Khairudin, Soewito, & Aminah. (2021). Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-Government di Indonesia. In *Amerta Media* (Vol. 1).
- Kusumawati, N. (2024). Dampak Digitalisasi Bagi Efektivitas Implementasi Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. *AKUNTANOGRAFI : Journal of Public Accounting*.
- Majid, J. (2019). *Akuntansi sektor publik*. Pusaka Almada.
- Mardiasmo. (2024). *Governansi : Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Akuntansi Menuju Keberlanjutan Organisasi* (Y. F. A (ed.)). Andi.
- Puspitasari, D. ayu, & Manurung, H. (2025). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta. *Studi Akuntansi Pajak Keuangan*. <https://doi.org/https://doi.org/10.61696/jusapak.v3i1.692>
- Rohma, F. F., Agustina, B., & Gymnastiar, M. (2023). Implementasi E-Accounting dan Efektivitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Kasus BPKAD Kota Surabaya. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*. <https://doi.org/https://doi.org/10.33508/jrma.v11i2.1163>
- Salehoddin. (2025). Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah , Kompetensi SDM , dan Pengawasan Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Islamic Economic Business*.
- Salsabila, S. N., Matulessy, Z. F., & Sandari, T. E. (2025). Analisis Literatur tentang Pengaruh Akuntansi Forensik dan Whistleblowing System terhadap Pengungkapan Kasus Korupsi. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 3(3), 142–159. <https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v3i3.5299>
- Sitepu, H. V, Slamet, B., Putri, F. C., Antoni, E., Silviana, D., Ungkari, M. D., Mila, S., Riwayat, A., Rachma Sari, K., Wibowo, A. S., & Bahiyah, K. (2024). *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

- UU. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Sekretariat Negara.
- UU. (2019). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
<https://peraturan.bpk.ac.id/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019>